

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD), dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan perbaikan mekanisme audit terhadap instansi pemerintah daerah. Pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan suatu tantangan karena lingkungan sektor publik yang sangat kompleks membutuhkan kompetensi tersendiri untuk mendesain sistem akuntansi yang akan diterapkan.

Sesuai dengan misi utama UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU. No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah desentralisasi. Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* (Sopannah dan Mardiasmo, 2003) dan Rosseptalia (2006) sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Pengertian *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang

baik. Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP adalah *participation, rule of way, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*. Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. DPRD mempunyai tiga fungsi legislatif yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif) yang telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan fungsi pengawasan pemerintah daerah melakukan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Penelitian ini akan membahas fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan sampai pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga eksekutif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada keuangan daerah dipengaruhi pengetahuan dewan tentang anggaran mengingat anggota

dewan umumnya berangkat dari partai politik ataukah disebabkan karena faktor lain.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002 dalam Rosseptalia, 2006). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan. Hal tersebut disebabkan karena kinerja dewan yang kurang akuntabel dan belum ada komitmen organisasi yang kuat dari para anggota dewan.

Sikap ketidakpercayaan masyarakat kepada dewan, padahal dewanlah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah, hal ini memotivasi peneliti mencari bukti empiris apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah, serta apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi

masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Penelitian terkait dengan pengawasan pernah dilakukan Sopanah dan Mardiasmo (2003), Rosseptalia (2006), serta Pramita dan Andriyanin (2010). Hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Pramita dan Andriyani (2010) dengan menguji kembali di kota yang berbeda yaitu Kota Salatiga pada Tahun 2011-2012. Dengan judul DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN DAERAH.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?
4. Apakah transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan anggaran mempengaruhi dewan dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.
2. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government).
3. Bagi partai politik dapat dijadikan sebagai acuan pada saat merekrut anggota dewan dan pengembangan kader partai.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut penulis menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi yang dalam perumusannya akan dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yaitu Pengertian Keuangan Daerah; Pengawasan Keuangan Daerah; Pengetahuan dan Pengawasan Keuangan Daerah; Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah; Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah; Tinjauan Penelitian Sebelumnya; Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan Data Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Identifikasi dan Pengukuran Variabel, Metode Analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisa dan membahas berdasarkan Pengertian Keuangan Daerah; Pengawasan Keuangan Daerah; Pengetahuan dan Pengawasan Keuangan Daerah; Akuntabilitas, Partisipasi

Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah; Transparasi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daeah; data-data yang dikumpulkan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

Dalam penutupan berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.